



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 064 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a) bahwa dengan adanya peningkatan nilai kapitalisasi aset tetap, beban persediaan yang dibuat lebih rinci, pengakuan beban barang dan jasa pada saat akhir tahun dan penambahan kode rekening untuk setiap uraian objek serta penghapusan kode rekening 4. Jalan, irigasi dan jaringan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 787, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturaan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Aba Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor     ), diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Akun Persediaan II.1.4 halaman 30 lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka 13.a, 13.b dan 13.c, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

13. Persediaan dapat terdiri dari:

a. Persediaan Bahan Pakai Habis, meliputi antara lain;

1. Persediaan Alat Tulis Kantor
2. Persediaan Dokumentasi / Administrasi Tender
3. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
6. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
7. Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
8. Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
9. Cenderamata/Hadiah
10. Bahan/Alat Kesehatan, Laboratorium Habis

Pakai

11. Pengisian Tabung Gas

b. Persediaan Bahan/Material;

1. Persediaan Bahan Baku Bangunan
2. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
3. Persediaan Bibit Ternak
4. Persediaan Bahan Obat-obatan
5. Persediaan Bahan Kimia
6. Persediaan Makanan Pokok
7. Bahan Praktek/keterampilan/Peraga
8. Bahan Laboratorium
9. Bahan Stimulan Kesling

c. Persediaan Ekstra Komtabel;

2. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Akun Aset Tetap II.1.5 halaman 39 lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir angka 34 poin b tabel peralatan dan mesin kode rekening 1.3.2.1 s.d 1.3.2.8, 1.3.2.11, 1.3.2.16, 1.3.2.17, 1.3.2.20 s.d 1.3.2.22 dan 1.3.2.31 diubah nilai per unit, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

| KODE REKENING |   |   |    | URAIAN REKENING OBJEK              | NILAI PER UNIT (Rp) |
|---------------|---|---|----|------------------------------------|---------------------|
| 1             | 3 | 2 | 1  | Alat-alat Besar Darat              | 10.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 2  | Alat-Alat Besar Apung              | 10.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 3  | Alat-Alat Bantu                    | 10.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 4  | Alat Angkutan Darat Bermotor       | 5.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 5  | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor   | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 6  | Alat Angkut Apung Bermotor         | 5.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 7  | Alat Angkut Apung Tak Bermotor     | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 8  | Alat Angkut Bermotor Udara         | 50.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur                          | 750.000             |
| 1             | 3 | 2 | 16 | Komputer                           | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar                 | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran                    | 1.000.000           |
| 1             | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan                     | 500.000             |
| 1             | 3 | 2 | 31 | Senjata Api                        | 5.000.000           |

3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Akun Beban II.4.1 halaman 115 lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir angka 32 poin b dan c diubah, diantara poin b dan c disisipkan poin baru yaitu poin b.1 dan b.2, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
32. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun;
    - 1. Masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
    - 2. Masih terdapat manfaat jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban dan diakui sebagai biaya dibayar dimuka yang diperhitungkan secara bulanan.
4. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang dan Belanja Modal/Aset Tetap halaman 125 lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir angka 26 poin d pada tabel kolom 1 diubah menjadi kode rekening dan kode rekening 4 jalan, irigasi dan jaringan dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

| KODE REKENING |   |   |   | URAIAN REKENING OBJEK              | NILAI PER UNIT (RP) |
|---------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------|
|               |   |   | 1 | Tanah                              | 1                   |
|               |   |   | 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri dari: |                     |
| 1             | 3 | 2 | 1 | Alat-alat Besar Darat              | 10.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 2 | Alat-Alat Besar Apung              | 10.000.000          |
| 1             | 3 | 2 | 3 | Alat-Alat Bantu                    | 10.000.000          |

|   |   |   |          |  |            |
|---|---|---|----------|--|------------|
| 1 | 3 | 2 | 4        | Alat Angkutan Darat Bermotor   | 5.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 5        | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                     | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 6        | Alat Angkut Apung Bermotor   | 5.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 7        | Alat Angkut Apung Tak Bermotor                                       | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 8        | Alat Angkut Bermotor Udara   | 50.000.000 |
| 1 | 3 | 2 | 9        | Alat Bengkel Bermesin  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 10       | Alat Bengkel Tak Bermesin  | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 11       | Alat Ukur  | 750.000    |
| 1 | 3 | 2 | 12       | Alat Pengolahan  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 13       | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan                             | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 14       | Alat Kantor  | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 15       | Alat Rumah Tangga  | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 16       | Komputer   | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 17       | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                   | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 18       | Alat Studio  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 19       | Alat Komunikasi  | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 20       | Peralatan Pemancar   | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 21       | Alat Kedokteran  | 1.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 22       | Alat Kesehatan   | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 23       | Unit-unit Laboratorium   | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 24       | Alat Peraga/Praktek Sekolah  | 200.000    |
| 1 | 3 | 2 | 25       | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir                                  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 26       | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika                          | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 27       | Alat Proteksi Radiasi Lingkungan/Proteksi Lingkungan                 | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 28       | Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 29       | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                                   | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 30       | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika                                 | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 31       | Senjata Api  | 5.000.000  |
| 1 | 3 | 2 | 32       | Persenjataan Non Senjata Api   | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 33       | Amunisi  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 34       | Senjata Sinar  | 500.000    |
| 1 | 3 | 2 | 35       | Alat Keamanan dan Perlindungan                                       | 500.000    |
|   |   |   | <b>3</b> | <b>Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:</b>                       |            |
|   |   |   | 3.1      | Bangunan Gedung  |            |
|   |   |   |          | - Tempat Kerja   | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Tempat Tinggal   | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Menara   | 10.000.000 |
|   |   |   | 3.2      | Bangunan Monumen   |            |
|   |   |   |          | - Bersejarah   | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Tugu Peringatan  | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Candi  | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Monumen Lainnya  | 10.000.000 |
|   |   |   |          | - Tugu Pembatas Lainnya  |            |
|   |   |   |          | - Tugu Batas   |            |
|   |   |   |          | - Rambu-rambu  |            |

|  |  |  |          |   |                 |
|--|--|--|----------|---|-----------------|
|  |  |  | <b>4</b> | <b>Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:</b>     |                 |
|  |  |  | 4.1      | Buku dan Perpustakaan *)                          | 100.000         |
|  |  |  | 4.2      | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/<br>Olahraga | 250.000         |
|  |  |  | 4.3      | Hewan/Ternak dan Tumbuhan                         |                 |
|  |  |  |          | a. Hewan  | 500.000         |
|  |  |  |          | b. Ternak   | 500.000         |
|  |  |  |          | c. Tumbuhan Pohon                                 | 500.000         |
|  |  |  |          | d. Tumbuhan Tanaman Hias                          | Ekstra Komtabel |
|  |  |  | <b>5</b> | <b>Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>                 | <b>1</b>        |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal 13 November 2017

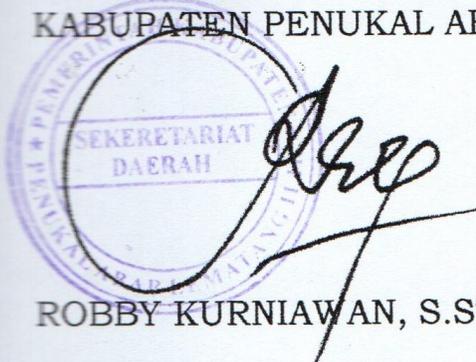
BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



HERI AMALINDO

Diundangkan di talang ubi  
Pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



ROBBY KURNIAWAN, S.STP.,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017  
NOMOR 066